
Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022)

Aldi Wiraguna

Universitas Palangka Raya

Yohanes Joni Pabelum

Universitas Palangka Raya

Golda Belladonna Umbing

Universitas Palangka Raya

Alamat: Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
74874

Korespondensi penulis: alদিwg123@gmail.com*

Abstract. *Finding out how the Regional Financial and Asset Management Agency of Katingan Regency measures financial performance using Value for Money is the goal. This research is categorized as a case study. Primary and secondary sources of information are used. A documentation is a data collector's best friend. We employ quantitative descriptive analysis to examine the data. In light of the fact that the Value for Money ratio level of program realization grew annually from 2018 to 2022, the study concludes that the fiscal performance of the Katingan Regency Government may be characterized as satisfactory. If we look at the economic ratio averaged over five years, we see that it falls at around 92.26%, thus we can say that it is economic. With an average efficiency ratio of little over 10%, this falls squarely into the "inefficient" group. The average effectiveness ratio is 97.93%, which falls into the effective group when it comes to efficacy. Economic efficiency and effectiveness meet the requirements set forth in Decree 600,900-327 of 1996, issued by the Minister of Home Affairs. Based on the data collected and analyzed from 2018 to 2022, the Katingan Regency Government has done an excellent job of overseeing the region's finances.*

Keywords: *value for money, economics, efficiency, effectiveness, outcome.*

Abstrak. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan Value for Money. Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan. Dokumentasi adalah sahabat terbaik pengumpul data. Kami menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menguji data. Mengingat tingkat rasio Value for Money realisasi program mengalami pertumbuhan setiap tahunnya pada tahun 2018 hingga tahun 2022, studi ini menyimpulkan bahwa kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dikatakan cukup memuaskan. Jika kita melihat rata-rata rasio ekonomi selama lima tahun, kita lihat turun sekitar 92,26%, sehingga bisa dikatakan ekonomis. Dengan rasio efisiensi rata-rata sedikit di atas 10%, perusahaan ini termasuk dalam kelompok "tidak efisien". Rasio efektivitas rata-rata adalah 97,93% yang termasuk dalam kelompok efektif jika dilihat dari kemanjurannya. Efisiensi dan efektivitas perekonomian memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan 600.900-327 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis pada tahun 2018 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam mengawasi keuangan daerah.

Kata kunci: *value for money, ekonomis, efisiensi, efektivitas, outcome.*

LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik di Indonesia sedang booming, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan pengertian otonomi daerah, pembangunan nasional mencakup inisiatif daerah dan lokal. Cara pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap keadaan suatu daerah, karena sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah. Untuk mengatur, mempergunakan, dan mendistribusikan sumber daya nasional secara adil, pemerintah menerbitkan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, otonomi daerah membantu memastikan bahwa semua daerah mendapatkan manfaat yang adil dari pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 39 Tahun 2020, kebijakan keuangan daerah diambil dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 dan bahaya lain terhadap perekonomian daerah, termasuk pengutamaan penggunaan dana untuk kegiatan tertentu. alokasi anggaran, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah memfokuskan kembali alokasi anggaran, melakukan perubahan alokasi, dan menggunakan APBD berdasarkan prioritas. Selanjutnya Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sama-sama menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Menurut Iskandar Tani (2023), kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas sektor publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan informasi tentang operasional pemerintah diungkapkan. Pemerintah federal dan negara bagian secara aktif mengupayakan tata kelola yang baik dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian. Penerapan otonomi daerah mendorong perubahan di sektor publik, yang pada gilirannya berdampak pada daerah melalui peningkatan akuntabilitas penggunaan dana yang diterima dan ditangani, semua atas nama tata kelola pemerintahan yang baik (Gagola, 2017: 117). Dua dari sembilan prinsip kepemimpinan yang efektif adalah keterbukaan dan tanggung jawab. Keduanya, jika diterapkan dengan baik, dapat membantu pemerintah mencapai tujuannya dan memenuhi harapan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penganggaran berbasis kinerja, hal ini mungkin terjadi dan hasilnya akan baik.

Selama beberapa tahun terakhir, akuntansi sektor publik telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Institusi sektor publik, termasuk satuan kerja pemerintah di semua tingkatan, semakin menuntut keterbukaan dan tanggung jawab terkait APBD. Konsep-konsep baru seperti “akuntabilitas publik”, “reformasi sektor publik”, “nilai uang”, “tata kelola publik yang baik”, dan “privatisasi” telah muncul di sektor publik dengan kekhawatiran akan perlunya peningkatan pengawasan perusahaan dan publik. Hal ini memastikan bahwa organisasi sektor publik bertanggung jawab atas praktik pengelolaan anggaran mereka.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, akan mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2023. Namun berdasarkan angka APBD, terjadi defisit dalam hal belanja. Dampak wabah ini terhadap pembangunan ekonomi mengharuskan Pemerintah Pusat memperbarui prediksi pendapatan, alokasi anggaran, dan transfer ke daerah. Kekurangan anggaran tersebut merupakan dampak dari upaya adaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian menjelang resesi global pada tahun 2023.

Realisasi pendapatan pada tahun 2018 lebih tinggi 104,78% dari target yang direncanakan, sedangkan realisasi belanja lebih tinggi 92,39%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan pengeluaran daerah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan pada tahun 2019 lebih rendah yaitu sebesar 94,62% dan belanja sebesar 92,23%. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan 95,3% lebih tinggi dari perkiraan, sementara belanja lebih rendah 89,19%. Tahun berikutnya, 2022, terjadi kenaikan realisasi sebesar 99%, setelah turun 94,54% pada tahun sebelumnya. Namun posisi pengeluarannya naik sebesar 91,49 persen. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 126.061.303.904,5 pada tahun 2019 dan defisit lainnya sebesar Rp. 166.349.259.950 pada tahun 2021, sesuai laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, belanja daerah terus meningkat, namun peningkatan pendapatan jauh lebih lambat dibandingkan peningkatan belanja. Bahkan pada tahun 2020 dan 2022, jumlah realisasi belanja daerah masih jauh dari jumlah yang dianggarkan. Inisiatif ini terbukti gagal mencapai tujuannya.

Selain itu, laporan realisasi menunjukkan perubahan tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sesuai temuan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. Variasi, khususnya volatilitas, pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya, yang mungkin naik atau turun. Misalnya, jika perkiraan pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber, dan penggunaan belanja yang telah dihitung sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka anggaran tersebut mungkin perlu direvisi (Wijayanto, 2018: 118). Namun apabila realisasi belanjanya melebihi dana yang dialokasikan, hal ini menunjukkan

bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tidak hemat biaya, efisien, efektif, atau out-cam. Sesuai dengan sejarah permasalahan yang dituangkan dalam pembicaraan dan berita sebelumnya. Para peneliti begitu tertarik dengan penelitian-penelitian yang judul kerjanya meliputi “**Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**”

KAJIAN TEORITIS

Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan, No. 1 Menurut paragraf 9, laporan keuangan dari sektor publik atau pemerintah menunjukkan bagaimana keuangan suatu entitas berubah sebagai akibat dari transaksi. Temuan percobaan dari (Amalia, 2020:19). Untuk memperjelas status aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah dalam perekonomian, serta untuk menunjukkan bahwa entitas pelapor bertanggung jawab atas dana yang dialokasikan kepadanya, merupakan tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah.

Mardiasmo (2019:18) menyatakan value for money merupakan konsep manajemen perusahaan sektor publik yang berpusat pada keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: mendapatkan sejumlah input dengan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Komponen utama ilmu ekonomi adalah penilaian input relatif terhadap nilai moneterinya. Definisi efisiensi adalah sejauh mana suatu proses mampu memaksimalkan keluarannya sambil meminimalkan masukannya. Untuk menentukan efisiensi, seseorang harus membandingkan output dan input dalam kaitannya dengan kriteria atau tujuan kinerja yang telah ditentukan. Se jauh mana tujuan program tercapai merupakan ukuran efektivitasnya. Efektivitas, dalam definisi paling mendasar, adalah rasio produksi terhadap hasil.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu rencana keuangan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah menetapkan APBD. Pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Tahun Anggaran APBD mencakup satu tahun kalender penuh. Untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan daerah digunakan anggaran belanja. Pendapatan dan pengeluaran yang dapat diganti, baik yang terjadi pada tahun fiskal saat ini atau yang akan datang, secara kolektif disebut sebagai pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Anda dapat menyebut investigasi semacam ini sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif. Ada berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk bahan primer dan sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam

dengan informan terkait seperti kepala anggaran pendapatan dan belanja daerah subbagian APBD Kabupaten Katingan. Untuk penelitian ini sumber data sekundernya adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Katingan Tahun 2018–2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan. Penelitian dalam bidang analisis nilai uang ini mengandalkan data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan internet.

Studi dokumentasi adalah sumber paling umum untuk jenis data studi ini, namun berasal dari berbagai tempat. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kantor BPKD Kabupaten Katingan dan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2018–2022. Jenis analisis data deskriptif kuantitatif, analisis berbasis perhitungan digunakan untuk memastikan tingkat rasio. Pengumpulan sampel data dari berbagai sumber, termasuk kertas laporan keuangan, merupakan tahap awal dalam penelitian ini untuk menetapkan status kinerja keuangan. Rasio kemudian diterapkan pada data untuk diproses dan dianalisis. Untuk menempatkan angka-angka numerik dalam perspektif, teknik analisis deskriptif digunakan untuk mensintesis lebih lanjut temuan-temuan perhitungan rasio. Mengikuti metodologi analisis data ini, penulis memulai dengan pengumpulan data, kemudian mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditinjau dari Segi Ekonomis

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan ukuran tingkat perekonomian. Ukuran kompetensi ekonomi dalam pengelolaan fiskal yang memperhitungkan jumlah aktual dan target yang dibelanjakan, serta proporsi keberhasilan dalam memenuhi kedua tujuan tersebut. Dapat disimpulkan anggaran sangat hemat apabila outcome lebih dari 100%. Anggaran dianggap terjangkau jika hasilnya berada dalam kisaran 90% hingga 100%. Anggaran yang lebih ekonomis akan memberikan hasil antara 80% dan 90%, namun anggaran yang kurang ekonomis akan memberikan hasil antara 60% dan 80%. Suatu usaha dianggap tidak layak apabila outputnya kurang dari 60% dari dana yang dialokasikan.

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Katingan memuat angka-angka yang diperlukan untuk menentukan keadaan perekonomian tahun anggaran 2018–2022.

$$\text{EKONOMIS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan rumus Ekonomi.

2. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditinjau dari Segi Efisiensi

mencapai output maksimum dengan input tertentu atau mencapai output tertentu dengan input terendah merupakan salah satu cara untuk mengukur efisiensi. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai sejauh mana keluaran suatu masukan memenuhi atau melampaui sasaran kinerja yang ditetapkan. Dapat disimpulkan anggaran tidak efisien jika outcome melebihi 100%. Anggaran menjadi tidak efisien jika hasil yang diperoleh berkisar antara 90% dan 100%. Anggaran yang efisien akan memberikan hasil antara 60% dan 80%, sedangkan anggaran yang sangat efisien akan memberikan hasil antara 80% dan 90%. Dianggap sangat efisien jika biaya akhir kurang dari 60% dana yang dialokasikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018–2022 untuk mengetahui seberapa efisiennya.

$$\text{EFESIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996,

Untuk menilai kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rumus Efisiensi yang berdasarkan Keputusan Menteri 690.900-327 Tahun 1996.

3. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Ditinjau Dari Segi Efektivitas

Agar dianggap berhasil, suatu program, kegiatan, atau organisasi harus mampu mencapai apa yang direncanakan. Hanya ketika hasil-hasilnya secara substansial membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka suatu usaha dapat dikatakan membuahkan hasil. Suatu anggaran dianggap sangat efektif jika dan hanya jika hasilnya melebihi 100%. Anggaran dianggap efektif jika hasilnya berada dalam kisaran 90% hingga 100%. Jika hasilnya berada di antara 80% dan 90%, kita dapat mengatakan bahwa anggaran

tersebut berhasil, namun hasil yang berada di antara 60% dan 80% menunjukkan bahwa anggaran tersebut kurang berhasil. Sebuah proyek dianggap tidak efektif jika biaya akhirnya kurang dari 60% dari anggaran yang dialokasikan.

Tingkat efektivitas ditentukan dengan melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021–2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

$$\text{EFEKTIF} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}}{\text{TARGET ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996,

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, metode efisien ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

1. Pembahasan

a) Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Rasio *Value for Money*

a) Rasio Ekonomi

Rasio perekonomian Pemerintah Kabupaten Katingan diukur selama lima tahun (2018–2022). Pada tahun 2018 sebesar 92,29% termasuk dalam kategori ekonomi. Tahun 2019 sebesar 92,23%, juga masuk kategori ekonomi. Tahun 2020 sebesar 89,18% sehingga cukup irit. Tahun 2021 sebesar 91,49%, juga masuk kategori ekonomi. Terakhir pada tahun 2022 sebesar 95,1%, juga masuk kategori ekonomi. kelas ekonomi. Sepanjang tahun 2018–2022, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan secara keseluruhan diukur pada rasio ekonomi sebesar 92,26%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan mampu menekan biaya. Tujuan dari indikator ekonomi ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan antara tahun 2018 hingga 2022 dalam memperoleh dan mengendalikan input yang diperlukan untuk mencegah pengeluaran uang yang tidak produktif. Melihat penghematan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan saja tidak cukup ketika menganalisis keekonomian suatu kegiatan; seseorang juga harus mengevaluasi produk yang dibuat. Jika outputnya tidak maksimal atau tidak bisa dioptimalkan, maka penghematan tidak ada artinya. Ketika sebuah organisasi pandai mengelola keuangannya dan menggunakan anggarannya dengan bijak, organisasi tersebut dapat mengurangi jumlah uang yang perlu dibelanjakan untuk input utama seperti tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal ke tingkat minimum. Inilah tujuan ilmu ekonomi.

b) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 94,28% pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, termasuk dalam kelompok kurang efisien; namun, angka tersebut melonjak menjadi 105,02% pada tahun 2019, sehingga menempatkannya pada kelompok tidak efisien. Efisien, rasionya sebesar 96,02% pada tahun 2020, 106,15% pada tahun 2021, dan 103,40% pada tahun 2022. termasuk yang dinilai tidak efisien. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, total rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan Pemkab Katingan sebesar 100,97% termasuk dalam kelompok tidak efisien. Jelas terlihat dari besarnya anggaran belanja yang menyebabkan sektor-sektor tertentu melakukan pemborosan uang, misalnya ketika terdapat cukup fasilitas namun tidak cukup uang untuk merenovasi atau membangunnya. Sumber inefisiensi anggaran lainnya adalah jumlah uang yang dikeluarkan pegawai, misalnya untuk perjalanan dinas dan rapat di luar kantor atau pembelian mobil dinas baru untuk instansi pemerintah. Selain itu, anggaran menjadi tidak efisien selama beberapa tahun karena adanya pemborosan di wilayah tertentu dan besarnya jumlah dana yang dialokasikan untuk memerangi epidemi COVID-19. Inefisiensi anggaran disebabkan oleh besarnya belanja yang didominasi oleh belanja penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan anggaran belanja semakin meningkat. sangat kecil. Dengan asumsi pengeluaran yang terkait dengan pencapaian tujuan anggaran melebihi realisasi uang anggaran yang dikumpulkan, maka tidak ada artinya bagi pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan.

c) Rasio Efektivitas

Selama lima tahun (2018–2022), peneliti menelusuri efisiensi Pemerintah Kabupaten Katingan. Pada tahun 2018, peringkat efisiensi sebesar 104,77% masuk dalam kategori Sangat Efektif. Pada tahun 2019, peringkat efisiensi sebesar 94,62%, sehingga masuk dalam kategori efektif. Rasio efektivitas tahun 2020 adalah sebesar 95,03% yang tergolong efektif; untuk tahun 2021 sebesar 94,54%, juga tergolong berhasil; dan untuk tahun 2022 sebesar 100,67% juga dinilai efektif. kategori yang berfungsi dengan baik. Pada tahun anggaran 2018–2022, Pemerintah Kabupaten Katingan mencapai rasio efektivitas sebesar 97,93% sehingga masuk dalam kategori efektif. Pengaruh keluaran (outcome) suatu program terhadap pencapaian tujuan program dapat digambarkan dengan suatu rasio yang mengukur efektivitas. Efektivitas suatu perusahaan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perusahaan memenuhi atau gagal mencapai tujuannya. Efisiensi suatu unit dalam mencapai tujuannya berbanding lurus dengan jumlah output yang dihasilkannya. Kenyataan bahwa belanja aktual cukup dekat dengan belanja yang direncanakan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Katingan telah

mencapai tujuan program kerjanya. Banyak pekerjaan yang dilakukan atas nama kesuksesan, namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari tahun 2018 hingga 2022, menurut penelitian, implementasi program ini berada dalam parameter ekonomi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sudah berjalan baik dari segi indikator perekonomian. Meskipun ada epidemi COVID-19, prinsip inti ekonominya adalah menghemat uang untuk bahan baku dibandingkan membuangnya untuk program, kegiatan, dan operasional organisasi.

Jika melihat evaluasi kinerja berdasarkan efisiensi, terlihat jelas bahwa anggaran tersebut tidak terlalu efektif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran yang bervariasi antara 90% hingga 100% bahkan pada kasus tertentu melebihi 100%. Untuk mengukur efisiensi, kita harus membandingkan input dengan output. Kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sedikit sumber daya merupakan ciri organisasi, program, atau aktivitas yang efisien. Masukan di sini dianggap untuk memastikan tidak ada lagi dana atau defisit yang dialokasikan, dan output yang diinginkan tetap dapat dihasilkan, kecuali COVID-19. Karena tingkat efektivitas pada tahun 2018 lebih dari 100%, pengukuran kinerja berdasarkan metrik tersebut dinilai sangat efektif. Dianggap efektif pada tahun 2019 hingga 2022 karena hasil perhitungannya berada pada kisaran 90% hingga 100%. Pencapaian tujuan program telah berhasil, berdasarkan hasil-hasil ini.

Pengukuran kinerja Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang memperhitungkan keekonomian, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan bahwa realisasi program pada tahun 2018 hingga tahun 2022 berdasarkan kriteria keekonomian. Anggaran tersebut kurang efektif dan efisien menurut metrik kinerja yang ditentukan oleh tingkat efisiensinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran yang bervariasi antara 90% hingga 100% bahkan pada kasus tertentu melebihi 100%. Karena belanja aktual sangat dekat dengan belanja yang direncanakan, maka belanja tersebut memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas.

b) Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Katingan Telah memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996.

Berdasarkan temuan, Value for Money Ratio Pemerintah Katingan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 600.900-327 Tahun 1996. Sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Keputusan No. 600.900-327 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Katingan. Mendagri, suatu kinerja dikatakan ekonomis jika rasio keekonomiannya mencapai 90%, efisien jika rasio efisiensinya mencapai 80% atau kurang, dan efektif jika rasio efektivitasnya mencapai 90%. Dengan menggabungkan ketiga

rasio ini, kami menemukan bahwa efisiensi dan keekonomian memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 600.900-327 tahun 1996. Karena rasio ekonomi yang menjadi indikasi pengukuran sudah tergolong ekonomis karena tingginya belanja yang masih bisa menghasilkan uang, maka kinerja Pemkab Katingan dikategorikan maksimal. wilayah yang lebih luas bagi Pemerintahan Kabupaten Katingan. Meningkatnya rasio ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menggunakan kriteria ekonomi dalam pengeluaran pengelolaan pendapatan daerah. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan belum mampu menekan belanja pendapatan daerah, maka rasio efisiensinya masih rendah. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Katingan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio efektivitas pendapatan daerah yang semakin mendukung klasifikasi rasio efektivitas tersebut efektif.

2. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditinjau dari Berdasarkan Outcome

a) Peran Retrospektif

Realisasi (pengelolaan) yang baik dapat ditunjukkan dengan analisis retrospektif, yang relevan untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Bukti ini dapat menjadi landasan bagi tujuan masa depan dan promosi praktik terbaik, atau dapat memandu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan. program atau inisiatif dan cara paling efektif untuk melaksanakannya.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Katingan yang sempat labil atau naik turun antara tahun 2018 hingga tahun 2022 menurut data BPS, mungkin bisa dipertahankan atau ditingkatkan sebagai bagian dari program peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2018, upaya pemerintah dalam memberikan pengelolaan yang efektif kepada masyarakat ditunjukkan dengan persentase sebagai berikut: (6,59%), (5,71%), (-3,8%), (2,90%), dan (5,58%) pada tahun 2021. Jika dikaji kinerja fiskal Badan Pengelola Aset dan Keuangan Kabupaten Katingan pada tahun 2018 hingga tahun 2022, penelitian menemukan bahwa Analisis Value For Money periode tersebut menghasilkan rasio ekonomi sebesar 90% hingga 100%, dan pada tingkat rasio efektivitas melebihi 100%, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah menjalankan peran retrospektifnya dengan baik. Oleh karena itu, merefleksikan kinerja pada tahun 2018-2022, tahun-tahun yang dimaksud, merupakan hal yang penting dalam fungsi retrospektif. Tujuan masa depan dan promosi praktik terbaik mungkin didasarkan pada data ini. Sehingga warga Kabupaten Katingan bisa hidup nyaman.

b) Peran Prospektif

Hasil penghitungan tingkat efisiensi adalah pemborosan dan biaya. Dengan melihat capaian kinerja tahun 2018 hingga tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dapat menetapkan program yang akan semakin menurunkan anggaran belanja riil dibandingkan anggaran pendapatan. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan sebesar -3,18%, belanja menjadi pusat perhatian berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya (2018–2022).

Analisis Value For Money mengklasifikasikan tidak efisien pada tahun 2019 dan 2021 karena temuan rasio efisiensi di atas 100%, namun pada tahun 2018–2022 menunjukkan tingkat rasio efisiensi antara 90% hingga 100%. Hal ini merupakan dampak dari pemotongan dan realokasi anggaran yang terjadi pada masa COVID-19. Oleh karena itu pengorganisasian kinerja seseorang untuk masa depan relevan dengan fungsi Calon. Untuk mencegah redistribusi uang dan terulangnya defisit, penilaian hasil memainkan peran penting dalam memandu pilihan belanja dan penganggaran sektor publik untuk tahun depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, Value for Money Ratio pada Pemerintah Kabupaten Katingan telah ditetapkan memenuhi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900-327 Tahun 1996. Rasio Ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sesuai Keputusan Nomor 600.900-327 Tahun 1996 Berdasarkan Analisis Value for Money, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2018–2022 yang telah disahkan dengan Keputusan telah sesuai dengan hukum.

Salah satu cara memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2018–2022 adalah sebagai buku sejarah, dan juga sebagai peta jalan ke depan. Dengan menjaga bahkan memperluas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan yang menurut data BPS akan mengalami naik turun atau pertumbuhan tidak stabil pada tahun 2018 hingga tahun 2022, maka peran retrospektif menunjukkan realisasi (manajemen yang baik) yang baik terhadap program-program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Katingan. pendapatan daerah. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan sebesar -3,18%, belanja menjadi pusat perhatian, menurut laporan keuangan tahun sebelumnya (2018–2022). Untuk menghindari kesalahan alokasi dan defisit anggaran dan belanja di masa depan, penilaian hasil memainkan peran penting dalam memandu

pilihan distribusi dana sumber daya publik untuk rencana anggaran dan pengeluaran tahun depan.

Para ahli di bidangnya memberikan rekomendasi yang didukung oleh temuan mereka. Seharusnya BPKAD Kabupaten Katingan memprioritaskan pengawasan dan penyiapan pemenuhan anggarannya, sesuai satu gagasan. Dengan menghilangkan pengeluaran yang sia-sia atau tidak perlu, mereka akan dapat menghemat uang saat melaksanakan rencana dan kegiatan mereka. Akibat belanja melebihi realisasi anggaran pendapatan, rasio efisiensi Katingan secara keseluruhan dinilai kurang efisien dan tidak efisien; Oleh karena itu, tata kelola yang unggul hanya dapat dicapai jika organisasi dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, C. R. (2020). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1-18.
- Ari Waluyo, (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 1-14 : <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/E-Bis>
- Bastian, (2018). Analisis Faktor- Faktor Metode Value For Money Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 1-14.
- Berita, H. (2020, Desember 18). *Dampak Covid-19 Apbd Katingan 2021 Defisit*. Retrieved From Bpk Ri: <https://Kalteng.Bpk.Go.Id/Dampak-Covid-19-Apbd-Katingan-2021-Defisit>
- Berita, H. (2022, Desember 2). *Ancaman Resesi Tahun Di 2023, Ini Ujar Wakil Rakyat*. Retrieved From Gerak Kalteng: <https://Gerakkalteng.Com/2022/12/Ancaman-Resesi-Di-Tahun-2023-Ini-Ujar-Wakil-Rakyat>
- Berita, H. (2022, November 28). *Naik, Apbd Kabupaten Katingan 2023 Alami Defisit*. Retrieved From Dayak New: <https://Dayaknews.Com/Katingan/Naik-Apbd-Kabupaten-Katingan-2023-Alami-Defisit/>
- Gagola, L. (2017). *journal unsrat. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud* , 108 - 117.
- Halim, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *IJPA-The Indonesian Journal*, 29-143

- Ihalauw, F. Y., Elim, I., & M Kapojos, P. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* , 1272-1280.
- Iskandar Tani, S. A. (2023). Analisis APBD dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 179-191
- Juwanda. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintahan Kota Mendan. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* , 1-11.
- Kurnia, S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. *IJPA-The Indonesian Journal*, 29-45
- Laporan BPS. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto 2018-2022*. Katingan: Badan Pusat Statistik, Kab.Katingan : <https://katingankab.bps.go.id>
- Laporan Keuangan. (2022). *Lra Kabupaten Katingan 2018,2019,2020,2021,2022*. Katingan: Apbd Kab.Katingan.
- Mahmudi, (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN,1-39.
- Mardiasmo, (2019). *Buku Buku Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset, . Deskripsi Fisik, 1-18. ,23cm.
- Negeri, K. M. (2002, Juni 10). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pend*. Retrieved From Jdih Bpk Ri: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/126550/Keputusan-Mendagri-No-29-Tahun-2002>
- Paisal Jadid, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020. *Journal unram*, 1-12.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, P. A. (2020, Mei 27). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 39, Bn 2020/ No 581;Dih.Sidoarjokab.Go.Id : 32 Hlm*. Retrieved From Jdih Bpk Ri: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/143495/Permendagri-No-39-Tahun-2020>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri, P. K. (2011, Mei 25). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved From Bn 2011/ No 112; Jdih.Surabaya.Go.Id : 24 Hlm: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/167662/Permendagri-No-21-Tahun-2011>

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri /1998, K. M. (1998, November 13). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Retrieved From Khazanah Dokumen Hukum Indonesia: <https://jdih.go.id/files/4/1998tapmprxv.pdf>
- Peraturan Pemerintah. (2010, Oktober 22). *Peraturan Pemerintah (Pp) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved From Bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Perdana, (2020). Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis *value for money* 2015 – 2019. *Jimat (Jurnal UMUL) 3* Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 1-10.
- Priyono, N. (2020). Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2018-2019). *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 1-14.
- PSAK. (2015, Februari 16). *Akuntansi Pemerintahan (Psap)*. Retrieved From Wikiapbn: <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-01/>
- Rusdi. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang . *Universitas Muhamadiyah Makassar*, 1-22.
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Dalam Struktur Apbd Dan Kinerja Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau . *Sorot*, 121-135.
- Tani, S. A., Amaliah, T. H., & Usman. (2023). Analisis Apbd Dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja . *Journal Of Management & Business*, 179-192.
- Tameon, A. F. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perode 2017-2021. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 40-50.
- Wijayanto, H. (2017). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Melalui Penerapan E-budgeting. *IJPA-The Indonesian Journal of*, 110-118.